



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan berkeadilan demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengatur ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan dengan peraturan bupati/walikota;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dinas di Daerah.
5. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan penyaluran dana Pengalokasian Bagian Hasilpajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pengajuan dan penyaluran;
- c. penyusunan dana pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- d. perubahan pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. pelaporan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 6

- (1) Bagian hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Besaran bagian hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata sama jumlahnya kepada seluruh Desa dari keseluruhan alokasi dana; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi Pajak Daerah.
- (3) Besaran bagian hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bagian hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

- serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran bagian hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata sama jumlahnya kepada seluruh Desa dari keseluruhan alokasi dana; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi Retribusi Daerah.
 - (3) Besaran bagian hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan secara bertahap dengan mekanisme:
 - a. tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen) dapat diajukan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan dengan persyaratan menyampaikan surat permohonan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I (pertama) yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya; dan
 - b. tahap II (kedua) sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat diajukan paling lambat 15 Desember tahun berjalan dengan persyaratan menyampaikan surat permohonan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II (kedua) yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana tahap II (kedua) dan laporan realisasi penggunaan dana tahap I (pertama);
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa yang terlambat mengajukan permohonan dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat mengajukan permohonannya setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat pernyataan *Perbekel* mengenai alasan keterlambatan dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan dana dengan diketahui oleh BPD.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 9

- (1) Penyalurandana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicairkan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDesa telah ditetapkan;
 - b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana yang disepakati oleh *Perbekel* dan BPD telah mendapat rekomendasi Camat; dan
 - c. surat pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer.

BAB V
PENYUSUNAN DANA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Dana bagian hasil Pajak Daerah digunakan untuk:
 - a. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan kewenangan Desa; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Dalam menggunakan dana bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Desa membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari dana bagian hasil Pajak Daerah yang diberikan oleh Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah

Pasal 11

Dana bagian hasil Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Desa serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Retribusi Daerah.

BAB VI
PERUBAHAN PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Perubahan pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan apabila ada perubahan dalam penetapan realisasi bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui mekanisme perubahan APBDesa.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI
PEMERINTAH (13/a)

NIP. 197907202005012013



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH

NO	KECAMATAN	DESA	REALISASI PAJAK	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH MERATA	BOBOT(0,50 0,33 0,17) Rp. 1.649.560.600,00			JUMLAH PROPOSIONAL	JUMLAH TERIMA TIAP DESA
							824.780.300,00	544.354.998,00	280.425.302,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUSUT	APUAN	589.527.334,56	411,48	4608	36.387.366,18	11.790.546,69	4.563.918,89	5.702.407,67	22.056.873,25	58.444.000,00
2	SUSUT	DEMULIH	589.527.334,56	443,47	4400	36.387.366,18	11.790.546,69	4.918.689,83	5.445.007,32	22.154.243,84	58.542.000,00
3	SUSUT	ABUAN	589.527.334,56	432,18	7006	36.387.366,18	11.790.546,69	4.793.534,70	8.669.936,66	25.254.018,04	61.641.000,00
4	SUSUT	SUSUT	589.527.334,56	515,69	6343	36.387.366,18	11.790.546,69	5.719.735,99	7.849.473,05	25.359.755,73	61.747.000,00
5	SUSUT	SULAHAN	675.241.620,27	680,19	8423	36.387.366,18	13.504.832,41	7.544.329,41	10.423.476,51	31.472.638,33	67.860.000,00
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	675.241.620,27	670,48	4037	36.387.366,18	13.504.832,41	7.436.669,26	4.995.794,22	25.937.295,88	62.325.000,00
7	SUSUT	TIGA	675.241.620,27	1.184,47	7319	36.387.366,18	13.504.832,41	13.137.516,29	9.057.274,68	35.699.623,37	72.087.000,00
8	SUSUT	SELAT	589.527.334,56	263,55	3629	36.387.366,18	11.790.546,69	2.923.196,06	4.490.893,54	19.204.636,29	55.592.000,00
9	SUSUT	PENGIANGAN	675.241.620,27	382,11	3112	36.387.366,18	13.504.832,41	4.238.179,27	3.851.105,18	21.594.116,85	57.981.000,00
1	BANGLI	BUNUTIN	589.527.334,56	290,88	4004	36.387.366,18	11.790.546,69	3.226.298,09	4.954.956,66	19.971.801,44	56.359.000,00
2	BANGLI	TAMANBALI	675.241.620,27	485,74	7198	36.387.366,18	13.504.832,41	5.387.542,02	8.907.536,98	27.799.911,40	64.187.000,00
3	BANGLI	KAYUBIHI	589.527.334,56	985,49	5618	36.387.366,18	11.790.546,69	10.930.582,19	6.952.284,35	29.673.413,23	66.061.000,00
4	BANGLI	PENGOTAN	756.194.001,23	1.099,05	4090	36.387.366,18	15.123.880,02	12.190.125,75	5.061.381,80	32.375.387,57	68.763.000,00
5	BANGLI	LANDIH	589.527.334,56	1.283,27	4155	36.387.366,18	11.790.546,69	14.233.350,46	5.141.819,41	31.165.716,56	67.553.000,00
1	TEMBUKU	JEHEM	589.527.334,56	846,83	8335	36.387.366,18	11.790.546,69	9.392.655,67	10.314.576,37	31.497.778,73	67.885.000,00
2	TEMBUKU	TEMBUKU	589.527.334,56	606,55	5339	36.387.366,18	11.790.546,69	6.727.488,28	6.607.021,38	25.125.056,35	61.512.000,00
3	TEMBUKU	YANGAPI	589.527.334,56	1.520,78	9615	36.387.366,18	11.790.546,69	16.867.711,12	11.898.578,50	40.556.836,30	76.944.000,00
4	TEMBUKU	UNDISAN	756.194.001,23	290,91	4137	36.387.366,18	15.123.880,02	3.226.599,53	5.119.544,38	23.470.023,94	59.857.000,00
5	TEMBUKU	BANGBANG	589.527.334,56	306,48	5096	36.387.366,18	11.790.546,69	3.399.300,00	6.306.308,48	21.496.155,17	57.884.000,00
6	TEMBUKU	PENINJOAN	589.527.334,56	1.299,04	10690	36.387.366,18	11.790.546,69	14.408.317,56	13.228.892,78	39.427.757,03	75.815.000,00
1	KINTAMANI	MENGANI	589.527.334,56	571,68	1047	36.387.366,18	11.790.546,69	6.340.744,24	1.295.664,24	19.426.955,18	55.814.000,00
2	KINTAMANI	BINYAN	589.527.334,56	207,59	342	36.387.366,18	11.790.546,69	2.302.499,42	423.225,57	14.516.271,68	50.904.000,00
3	KINTAMANI	ULIAN	589.527.334,56	418,86	948	36.387.366,18	11.790.546,69	4.645.743,29	1.173.151,58	17.609.441,55	53.997.000,00
4	KINTAMANI	BUNUTIN	589.527.334,56	342,08	975	36.387.366,18	11.790.546,69	3.794.125,83	1.206.564,12	16.791.236,64	53.179.000,00
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	589.527.334,56	314,64	1184	36.387.366,18	11.790.546,69	3.489.872,13	1.465.201,97	16.745.620,79	53.133.000,00
6	KINTAMANI	LEMBEAN	589.527.334,56	393,78	740	36.387.366,18	11.790.546,69	4.367.621,63	915.751,23	17.073.919,55	53.461.000,00
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	589.527.334,56	763,45	1708	36.387.366,18	11.790.546,69	8.467.812,76	2.113.652,84	22.372.012,29	58.759.000,00
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	589.527.334,56	310,67	1203	36.387.366,18	11.790.546,69	3.445.741,38	1.488.714,50	16.725.002,57	53.112.000,00
9	KINTAMANI	MANGGUH	352.316.397,06	231,00	773	36.387.366,18	7.046.327,94	2.562.096,49	956.588,79	10.565.013,22	46.952.000,00
10	KINTAMANI	BELANCAN	589.527.334,56	1.068,51	2168	36.387.366,18	11.790.546,69	11.851.410,86	2.682.903,61	26.324.861,16	62.712.000,00
11	KINTAMANI	KATUNG	589.527.334,56	349,15	1677	36.387.366,18	11.790.546,69	3.872.588,97	2.075.290,29	17.738.425,95	54.126.000,00
12	KINTAMANI	BANUA	589.527.334,56	82,15	721	36.387.366,18	11.790.546,69	911.183,05	892.238,70	13.593.968,44	49.981.000,00
13	KINTAMANI	ABUAN	589.527.334,56	381,59	1665	36.387.366,18	11.790.546,69	4.232.346,55	2.060.440,27	18.083.333,51	54.471.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	REALISASI PAJAK	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH MERATA	BOBOT(0,50 0,33 0,17) Rp. 1.649.560.600,00			JUMLAH PROPOSIONAL	JUMLAH TERIMA TIAP DESA
							824.780.300,00	544.354.998,00	280.425.302,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KINTAMANI	BONYOH	589.527.334,56	357,36	1266	36.387.366,18	11.790.546,69	3.963.641,44	1.566.677,11	17.320.865,24	53.708.000,00
15	KINTAMANI	SEKAAN	589.527.334,56	366,96	1931	36.387.366,18	11.790.546,69	4.070.112,63	2.389.615,71	18.250.275,03	54.638.000,00
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	589.527.334,56	988,64	2244	36.387.366,18	11.790.546,69	10.965.454,21	2.776.953,73	25.532.954,63	61.920.000,00
17	KINTAMANI	SEKARDADI	589.527.334,56	537,07	1915	36.387.366,18	11.790.546,69	5.956.888,58	2.369.815,69	20.117.250,95	56.505.000,00
18	KINTAMANI	KEDISAN	841.908.286,94	321,01	1397	36.387.366,18	16.838.165,74	3.560.430,44	1.728.789,82	22.127.386,00	58.515.000,00
19	KINTAMANI	BUAHAN	756.194.001,23	417,23	1839	36.387.366,18	15.123.880,02	4.627.729,37	2.275.765,56	22.027.374,96	58.415.000,00
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	352.316.397,06	1.289,07	1301	36.387.366,18	7.046.327,94	14.297.676,08	1.609.989,66	22.953.993,69	59.341.000,00
21	KINTAMANI	SUTER	589.527.334,56	515,21	2020	36.387.366,18	11.790.546,69	5.714.458,24	2.499.753,36	20.004.758,29	56.392.000,00
22	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	589.527.334,56	492,44	2790	36.387.366,18	11.790.546,69	5.461.895,57	3.452.629,64	20.705.071,90	57.092.000,00
23	KINTAMANI	TERUNYAN	589.527.334,56	1.113,68	3071	36.387.366,18	11.790.546,69	12.352.371,24	3.800.367,61	27.943.285,54	64.331.000,00
24	KINTAMANI	SONGAN A	589.527.334,56	1.276,66	7703	36.387.366,18	11.790.546,69	14.160.077,80	9.532.475,32	35.483.099,81	71.870.000,00
25	KINTAMANI	SONGAN B	756.194.001,23	2.045,68	11042	36.387.366,18	15.123.880,02	22.689.641,32	13.664.493,37	51.478.014,71	87.865.000,00
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	756.194.001,23	2.027,91	6559	36.387.366,18	15.123.880,02	22.492.475,25	8.116.773,41	45.733.128,68	82.120.000,00
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	841.908.286,94	1.255,40	3342	36.387.366,18	16.838.165,74	13.924.219,70	4.135.730,56	34.898.116,00	71.285.000,00
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	756.194.001,23	421,67	1777	36.387.366,18	15.123.880,02	4.676.941,31	2.199.040,46	21.999.861,79	58.387.000,00
29	KINTAMANI	KINTAMANI	756.194.001,23	1.458,28	7097	36.387.366,18	15.123.880,02	16.174.496,24	8.782.549,31	40.080.925,57	76.468.000,00
30	KINTAMANI	SERAI	589.527.334,56	501,56	1155	36.387.366,18	11.790.546,69	5.563.098,88	1.429.314,42	18.782.959,99	55.170.000,00
31	KINTAMANI	DAUP	589.527.334,56	249,64	761	36.387.366,18	11.790.546,69	2.768.850,29	941.738,77	15.501.135,75	51.889.000,00
32	KINTAMANI	AWAN	589.527.334,56	704,19	1348	36.387.366,18	11.790.546,69	7.810.523,61	1.668.152,24	21.269.222,55	57.657.000,00
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	589.527.334,56	147,69	630	36.387.366,18	11.790.546,69	1.638.099,28	779.626,05	14.208.272,01	50.596.000,00
34	KINTAMANI	BELANGA	589.527.334,56	318,98	594	36.387.366,18	11.790.546,69	3.537.986,69	735.075,99	16.063.609,37	52.451.000,00
35	KINTAMANI	BATUKAANG	589.527.334,56	327,72	644	36.387.366,18	11.790.546,69	3.634.890,54	796.951,07	16.222.388,30	52.610.000,00
36	KINTAMANI	BELANTIH	589.527.334,56	503,49	2737	36.387.366,18	11.790.546,69	5.584.399,23	3.387.042,05	20.761.987,97	57.149.000,00
37	KINTAMANI	CATUR	589.527.334,56	1.081,95	2055	36.387.366,18	11.790.546,69	12.000.482,21	2.543.065,92	26.334.094,82	62.721.000,00
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	352.316.397,06	433,98	803	36.387.366,18	7.046.327,94	4.813.516,27	993.713,84	12.853.558,05	49.241.000,00
39	KINTAMANI	SELULUNG	589.527.334,56	1.058,64	2517	36.387.366,18	11.790.546,69	11.741.872,76	3.114.791,69	26.647.211,14	63.035.000,00
40	KINTAMANI	SATRA	589.527.334,56	869,29	4443	36.387.366,18	11.790.546,69	9.641.690,37	5.498.219,89	26.930.456,95	63.318.000,00
41	KINTAMANI	DAUSA	589.527.334,56	544,71	3141	36.387.366,18	11.790.546,69	6.041.690,38	3.886.992,73	21.719.229,79	58.107.000,00
42	KINTAMANI	BANTANG	589.527.334,56	658,14	1786	36.387.366,18	11.790.546,69	7.299.732,60	2.210.177,97	21.300.457,26	57.688.000,00
43	KINTAMANI	SUKAWANA	589.527.334,56	3.200,98	6278	36.387.366,18	11.790.546,69	35.503.579,78	7.769.035,44	55.063.161,91	91.451.000,00
44	KINTAMANI	KUTUH	352.316.397,06	519,53	1565	36.387.366,18	7.046.327,94	5.762.384,21	1.936.690,10	14.745.402,25	51.133.000,00
45	KINTAMANI	SUBAYA	589.527.334,56	463,54	1328	36.387.366,18	11.790.546,69	5.141.311,83	1.643.402,21	18.575.260,73	54.963.000,00
46	KINTAMANI	SIAKIN	589.527.334,56	787,58	2100	36.387.366,18	11.790.546,69	8.735.396,54	2.598.753,49	23.124.696,72	59.512.000,00
47	KINTAMANI	PINGGAN	589.527.334,56	1.869,38	2003	36.387.366,18	11.790.546,69	20.734.171,82	2.478.715,83	35.003.434,34	71.391.000,00
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	589.527.334,56	519,61	1119	36.387.366,18	11.790.546,69	5.763.284,35	1.384.764,36	18.938.595,40	55.327.500,00
TOTAL			41.239.015.000,00	49.078,65	226.606,00	2.474.340.900,00	824.780.300,00	544.354.998,00	280.425.302,00	1.649.560.600,00	4.123.901.500,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

www.jdih.banglikab.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

NO	KECAMATAN	DESA	REALISASI RETRIBUSI	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH MERATA	BOBOT (0,50 0,33 0,17) Rp.			2.397.400.240,00	JUMLAH PROPORSONAL	JUMLAH TERIMA TIAP DESA
							1.198.700.120,00	791.142.079,20	407.558.040,80			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SUSUT	APUAN	880.398.911,76	4608	411,48	52.883.828,82	17.607.978,24	16.087.758,93	3.417.001,50	37.112.738,67	89.995.000,00	
2	SUSUT	DEMULIH	880.398.911,76	4400	443,47	52.883.828,82	17.607.978,24	15.361.575,37	3.682.618,14	36.652.171,75	89.536.000,00	
3	SUSUT	ABUAN	880.398.911,76	7006	432,18	52.883.828,82	17.607.978,24	24.459.817,51	3.588.914,62	45.656.710,36	98.541.000,00	
4	SUSUT	SUSUT	880.398.911,76	6343	515,69	52.883.828,82	17.607.978,24	22.145.107,40	4.282.360,60	44.035.446,24	96.919.000,00	
5	SUSUT	SULAHAN	880.398.911,76	8423	680,19	52.883.828,82	17.607.978,24	29.406.943,03	5.648.431,86	52.663.353,13	105.547.000,00	
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	880.398.911,76	4037	670,48	52.883.828,82	17.607.978,24	14.094.245,40	5.567.826,81	37.270.050,45	90.154.000,00	
7	SUSUT	TIGA	880.398.911,76	7319	1.184,47	52.883.828,82	17.607.978,24	25.552.584,12	9.836.045,26	52.996.607,62	105.880.000,00	
8	SUSUT	SELAT	880.398.911,76	3629	263,55	52.883.828,82	17.607.978,24	12.669.808,41	2.188.593,96	32.466.380,61	85.350.000,00	
9	SUSUT	PENGIANGAN	880.398.911,76	3112	382,11	52.883.828,82	17.607.978,24	10.864.823,31	3.173.120,57	31.645.922,11	84.530.000,00	
1	BANGLI	BUNUTIN	880.398.911,76	4004	290,88	52.883.828,82	17.607.978,24	13.979.033,59	2.415.526,14	34.002.537,96	86.886.000,00	
2	BANGLI	TAMANBALI	880.398.911,76	7198	485,74	52.883.828,82	17.607.978,24	25.130.140,80	4.033.647,31	46.771.766,34	99.656.000,00	
3	BANGLI	KAYUBIHI	880.398.911,76	5618	985,49	52.883.828,82	17.607.978,24	19.613.938,73	8.183.715,92	45.405.632,89	98.289.000,00	
4	BANGLI	PENGOTAN	880.398.911,76	4090	1.099,05	52.883.828,82	17.607.978,24	14.279.282,56	9.126.734,91	41.013.995,71	93.898.000,00	
5	BANGLI	LANDIH	880.398.911,76	4155	1.283,27	52.883.828,82	17.607.978,24	14.506.214,92	10.656.495,21	42.770.688,37	95.655.000,00	
1	TEMBUKU	JEHEM	880.398.911,76	8335	846,83	52.883.828,82	17.607.978,24	29.099.711,53	7.032.271,88	53.739.961,64	106.624.000,00	
2	TEMBUKU	TEMBUKU	880.398.911,76	5339	606,55	52.883.828,82	17.607.978,24	18.639.875,21	5.036.863,72	41.284.717,17	94.169.000,00	
3	TEMBUKU	YANGAPI	880.398.911,76	9615	1.520,78	52.883.828,82	17.607.978,24	33.568.533,45	12.628.838,39	63.805.350,08	116.689.000,00	
4	TEMBUKU	UNDISAN	880.398.911,76	4137	290,91	52.883.828,82	17.607.978,24	14.443.372,12	2.415.751,83	34.467.102,18	87.351.000,00	
5	TEMBUKU	BANGBANG	880.398.911,76	5096	306,48	52.883.828,82	17.607.978,24	17.791.497,29	2.545.052,50	37.944.528,03	90.828.000,00	
6	TEMBUKU	PENINJOAN	880.398.911,76	10690	1.299,04	52.883.828,82	17.607.978,24	37.321.645,62	10.787.492,90	65.717.116,75	118.601.000,00	
1	KINTAMANI	MENGANI	880.398.911,76	1047	571,68	52.883.828,82	17.607.978,24	3.655.356,68	4.747.308,85	26.010.643,77	78.894.000,00	
2	KINTAMANI	BINYAN	880.398.911,76	342	207,59	52.883.828,82	17.607.978,24	1.194.013,36	1.723.879,01	20.525.870,60	73.410.000,00	
3	KINTAMANI	ULIAN	880.398.911,76	948	418,86	52.883.828,82	17.607.978,24	3.309.721,24	3.478.263,34	24.395.962,81	77.280.000,00	
4	KINTAMANI	BUNUTIN	880.398.911,76	975	342,08	52.883.828,82	17.607.978,24	3.403.985,45	2.840.658,20	23.852.621,89	76.736.000,00	
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	880.398.911,76	1184	314,64	52.883.828,82	17.607.978,24	4.133.660,28	2.612.863,76	24.354.502,28	77.238.000,00	
6	KINTAMANI	LEMBEAN	880.398.911,76	740	393,78	52.883.828,82	17.607.978,24	2.583.537,68	3.270.033,93	23.461.549,84	76.345.000,00	
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	880.398.911,76	1708	763,45	52.883.828,82	17.607.978,24	5.963.084,26	6.339.842,91	29.910.905,41	82.795.000,00	
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	880.398.911,76	1203	310,67	52.883.828,82	17.607.978,24	4.199.994,36	2.579.823,11	24.387.795,71	77.272.000,00	
9	KINTAMANI	MANGGUH	880.398.911,76	773	231,00	52.883.828,82	17.607.978,24	2.698.749,49	1.918.239,07	22.224.966,80	75.109.000,00	
10	KINTAMANI	BELANCAN	880.398.911,76	2168	1.068,51	52.883.828,82	17.607.978,24	7.569.067,14	8.873.139,42	34.050.184,79	86.934.000,00	
11	KINTAMANI	KATUNG	880.398.911,76	1677	349,15	52.883.828,82	17.607.978,24	5.854.854,98	2.899.403,48	26.362.236,69	79.246.000,00	
12	KINTAMANI	BANUA	880.398.911,76	721	82,15	52.883.828,82	17.607.978,24	2.517.203,60	682.201,83	20.807.383,67	73.691.000,00	
13	KINTAMANI	ABUAN	880.398.911,76	1665	381,59	52.883.828,82	17.607.978,24	5.812.959,77	3.168.753,61	26.589.691,62	79.474.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	REALISASI RETRIBUSI	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH MERATA	BOBOT (0,50 0,33 0,17) Rp.				2.397.400.240,00	JUMLAH PROPORSONAL	JUMLAH TERIMA TIAP DESA
							1.198.700.120,00	791.142.079,20	407.558.040,80				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
14	KINTAMANI	BONYOH	880.398.911,76	1266	357,36	52.883.828,82	17.607.978,24	4.419.944,19	2.967.574,37	24.995.496,79	77.879.000,00		
15	KINTAMANI	SEKAAN	880.398.911,76	1931	366,96	52.883.828,82	17.607.978,24	6.741.636,83	3.047.289,24	27.396.904,30	80.281.000,00		
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	880.398.911,76	2244	988,64	52.883.828,82	17.607.978,24	7.834.403,44	8.209.824,56	33.652.206,24	86.536.000,00		
17	KINTAMANI	SEKARDADI	880.398.911,76	1915	537,07	52.883.828,82	17.607.978,24	6.685.776,55	4.459.916,50	28.753.671,29	81.638.000,00		
18	KINTAMANI	KEDISAN	880.398.911,76	1397	321,01	52.883.828,82	17.607.978,24	4.877.300,18	2.665.690,70	25.150.969,11	78.035.000,00		
19	KINTAMANI	BUAHAN	880.398.911,76	1839	417,23	52.883.828,82	17.607.978,24	6.420.440,25	3.464.776,34	27.493.194,83	80.377.000,00		
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	880.398.911,76	1301	1.289,07	52.883.828,82	17.607.978,24	4.542.138,54	10.704.655,74	32.854.772,51	85.739.000,00		
21	KINTAMANI	SUTER	880.398.911,76	2020	515,21	52.883.828,82	17.607.978,24	7.052.359,60	4.278.409,15	28.938.746,99	81.823.000,00		
22	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	880.398.911,76	2790	492,44	52.883.828,82	17.607.978,24	9.740.635,29	4.089.315,73	31.437.929,26	84.322.000,00		
23	KINTAMANI	TERUNYAN	948.278.911,76	3071	1.113,68	52.883.828,82	18.965.578,24	10.721.681,36	9.248.207,96	38.935.467,55	91.819.000,00		
24	KINTAMANI	SONGAN A	880.398.911,76	7703	1.276,66	52.883.828,82	17.607.978,24	26.893.230,70	10.601.636,04	55.102.844,98	107.987.000,00		
25	KINTAMANI	SONGAN B	880.398.911,76	11042	2.045,68	52.883.828,82	17.607.978,24	38.550.571,65	16.987.711,69	73.146.261,57	126.030.000,00		
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	880.398.911,76	6559	2.027,91	52.883.828,82	17.607.978,24	22.899.221,10	16.840.093,65	57.347.292,99	110.231.000,00		
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	880.398.911,76	3342	1.255,40	52.883.828,82	17.607.978,24	11.667.814,75	10.425.049,32	39.700.842,30	92.585.000,00		
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	880.398.911,76	1777	421,67	52.883.828,82	17.607.978,24	6.203.981,69	3.501.621,27	27.313.581,19	80.197.000,00		
29	KINTAMANI	KINTAMANI	880.398.911,76	7097	1.458,28	52.883.828,82	17.607.978,24	24.777.522,82	12.109.829,10	54.495.330,16	107.379.000,00		
30	KINTAMANI	SERAI	880.398.911,76	1155	501,56	52.883.828,82	17.607.978,24	4.032.413,53	4.165.086,55	25.805.478,32	78.689.000,00		
31	KINTAMANI	DAUP	880.398.911,76	761	249,64	52.883.828,82	17.607.978,24	2.656.854,29	2.073.035,44	22.337.867,96	75.222.000,00		
32	KINTAMANI	AWAN	880.398.911,76	1348	704,19	52.883.828,82	17.607.978,24	4.706.228,09	5.847.731,19	28.161.937,52	81.046.000,00		
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	880.398.911,76	630	147,69	52.883.828,82	17.607.978,24	2.199.498,29	1.226.443,28	21.033.919,81	73.918.000,00		
34	KINTAMANI	BELANGA	880.398.911,76	594	318,98	52.883.828,82	17.607.978,24	2.073.812,68	2.648.887,08	22.330.677,99	75.215.000,00		
35	KINTAMANI	BATUKAANG	880.398.911,76	644	327,72	52.883.828,82	17.607.978,24	2.248.376,03	2.721.438,90	22.577.793,17	75.462.000,00		
36	KINTAMANI	BELANTIH	880.398.911,76	2737	503,49	52.883.828,82	17.607.978,24	9.555.598,13	4.181.034,10	31.344.610,47	84.228.000,00		
37	KINTAMANI	CATUR	880.398.911,76	2055	1.081,95	52.883.828,82	17.607.978,24	7.174.553,95	8.984.748,99	33.767.281,17	86.651.000,00		
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	880.398.911,76	803	433,98	52.883.828,82	17.607.978,24	2.803.487,51	3.603.874,80	24.015.340,54	76.899.000,00		
39	KINTAMANI	SELULUNG	880.398.911,76	2517	1.058,64	52.883.828,82	17.607.978,24	8.787.519,37	8.791.128,35	35.186.625,95	88.070.000,00		
40	KINTAMANI	SATRA	880.398.911,76	4443	869,29	52.883.828,82	17.607.978,24	15.511.699,86	7.218.723,90	40.338.402,00	93.222.000,00		
41	KINTAMANI	DAUSA	880.398.911,76	3141	544,71	52.883.828,82	17.607.978,24	10.966.070,05	4.523.407,52	33.097.455,81	85.981.000,00		
42	KINTAMANI	BANTANG	880.398.911,76	1786	658,14	52.883.828,82	17.607.978,24	6.235.403,09	5.465.302,47	29.308.683,80	82.193.000,00		
43	KINTAMANI	SUKAWANA	880.398.911,76	6278	3.200,98	52.883.828,82	17.607.978,24	21.918.175,04	26.581.494,55	66.107.647,83	118.991.000,00		
44	KINTAMANI	KUTUH	880.398.911,76	1565	519,53	52.883.828,82	17.607.978,24	5.463.833,06	4.314.291,27	27.386.102,57	80.270.000,00		
45	KINTAMANI	SUBAYA	880.398.911,76	1328	463,54	52.883.828,82	17.607.978,24	4.636.402,75	3.849.295,01	26.093.675,99	78.978.000,00		
46	KINTAMANI	SIKIN	880.398.911,76	2100	787,58	52.883.828,82	17.607.978,24	7.331.660,97	6.540.182,62	31.479.821,83	84.364.000,00		
47	KINTAMANI	PINGGAN	880.398.911,76	2003	1.869,38	52.883.828,82	17.607.978,24	6.993.008,06	15.523.653,64	40.124.639,93	93.008.000,00		
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	880.398.911,76	1119	519,61	52.883.828,82	17.607.978,24	3.906.727,92	4.314.965,21	25.829.671,36	78.713.600,00		
TOTAL			59.935.006.000,00	226.606,00	49.078,65	3.596.100.360,00	1.198.700.120,00	791.142.079,20	407.558.040,80	2.397.400.240,00	5.993.500.600,00		

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

www.jdih.banglikab.go.id